

Analisa Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Petugas Kusta dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang

Analysis of Factors Affecting Obedience Officer Leprosy in the Implementation of Leprosy SOP Services District Puskesmas Sampang

TAUFIK HIDAYAT*

*Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

ABSTRACT

Sampang was one of the highest contributors to the number of lepers in East Java. Based on the data in 2011, found that the number of leprosy patients in Sampang were 617 or 7,37% of 10,000 people with 125 people leprosy reactions or 20,25% of the total number of patients. The result of preliminary survey showed that 75% of officers were not obedient in implementing of giving drug leprosy Standard Operating Procedure (SOP). The purpose of this study is identify the influence of commitment and motivation in implementing of obedience leprosy services SOP, (5) Construct a recommendation to improve the obedience of officers in implementation of leprosy services SOP at Sampang health center. This study was an observational analytic study used cross sectional approach. The population in this study was all officers of leprosy in a Sampang health center. The result showed that things affected to implementation obedience of SOP are policy of SOP, legitimate power and commitment of leprosy officer. It will be recommended to improve the obedience of officer in executing of leprosy SOP by constructing a policy on the implementation of Leprosy SOP.

Keywords: *Obedience, leprosy officer, Standard Operating Procedure*

Correspondence: Taufik Hidayat, Dinas Kabupaten Sampang, Jl. KH. Wahed Hasim No. 23 Sampang Madura. Telp. (0323) 324584. Email: emtaufiq76@yahoo.co.id.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai pentahapannya. Salah satu sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah Upaya Kesehatan (Depkes, 2009).

Aplikasi dari sub sistem upaya kesehatan diantaranya dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan rumah sakit. Selama ini pemerintah telah membangun Puskesmas dan jaringannya di seluruh Indonesia. Rata-rata setiap kecamatan mempunyai dua Puskesmas, setiap tiga desa mempunyai satu Puskesmas pembantu. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten atau kota bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dengan melaksanakan program wajib Puskesmas. Salah satu program wajib Puskesmas adalah upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Depkes, 2004).

Salah satu program wajib Puskesmas adalah upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (Depkes, 2004). Pemberantasan penyakit kusta merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit menular.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menjadi penyumbang tertinggi angka penderita kusta. Berdasarkan data tahun 2011 didapatkan bahwa jumlah penderita kusta di Kabupaten Sampang 617 penderita atau prevalensinya 7,37%/10.000 penduduk dengan kejadian reaksi pada penderita kusta sebanyak 125 orang atau 20,25% dari jumlah total penderita. Tidak ada target nasional untuk kejadian reaksi kusta, tetapi disarankan seminimal mungkin tidak terjadi reaksi pada penderita kusta. Tingginya angka reaksi kusta menunjukkan ketidakterampilan petugas dalam menangani penyakit kusta.

Tingginya angka reaksi kusta menunjukkan ketidakterampilan petugas dalam menangani penyakit kusta. Reaksi kusta, yang merupakan suatu reaksi kekebalan yang abnormal (respons imun seluler atau respons imun humoral), dengan akibat yang merugikan penderita. Reaksi kusta dapat terjadi sebelum, selama atau sesudah pengobatan dengan obat kusta. Reaksi kusta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu reaksi kusta tipe I dan reaksi kusta tipe II. Reaksi kusta tipe I disebabkan karena meningkatnya kekebalan seluler secara cepat, ditandai lesi kulit memerah, bengkak, nyeri, panas, neuritis dan gangguan fungsi saraf serta dapat terjadi demam. Sebaliknya reaksi tipe II merupakan reaksi humoral, yang ditandai dengan timbulnya nodul kemerahan, neuritis, gangguan fungsi saraf tepi, gangguan konstitusi dan adanya komplikasi pada organ tubuh lainnya.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan telah dilakukan kepada petugas kusta tentang kepatuhan petugas terhadap SOP pemberian obat kusta. Dari latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan petugas sebesar 25% dalam melaksanakan SOP pelayanan kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang Tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang berdasarkan analisis pengaruh faktor Dinas Kesehatan (monitoring evaluasi dan kebijakan pelaksanaan SOP pelayanan kusta), faktor *power* kepala Puskesmas (*reward power*, *coercive power*, *legitimate power*, *expert power*, *referent power* dan *informational power*), faktor petugas (komitmen dan motivasi) terhadap kepatuhan petugas kusta melaksanakan SOP pelayanan kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan lingkup masalah, penelitian ini merupakan penelitian analitik. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif yang bertujuan menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan petugas kusta dalam melaksanakan SOP pelayanan kusta. Pengumpulan data dilakukan secara cross sectional yang berarti tiap subjek penelitian hanya diobservasi dan diukur sekali saja terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten Sampang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang. Jumlah populasi sebanyak 21 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang. Satu Puskesmas tidak dijadikan sampel karena Puskesmas peneliti.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi semua variabel termasuk gambaran umum responden. Selain itu juga dilakukan analisis pengaruh dengan menggunakan uji statistik regresi logistik ganda yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan petugas kusta dalam melaksanakan SOP pelayanan kusta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Petugas Kusta dalam Melaksanakan SOP Pelayanan Kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi) dinilai cukup dengan rincian yang terdiri dari rutinitas pelaksanaan monev kepada petugas kusta, monev SOP pelayanan kusta langsung kepada petugas kusta, *feedback* laporan kusta bulanan sebagai evaluasi, pertemuan rutin bulanan petugas kusta sebagai evaluasi, dan tim Kusta Kabupaten yang memantau pasien kusta langsung merupakan bagian evaluasi. Pelaksanaan kebijakan dinilai cukup dengan

rincian legalitas SOP pelayanan kusta, SOP pemeriksaan kusta sebagai pedoman pemeriksaan kusta, SOP pengobatan kusta sebagai pedoman pengobatan kusta. SOP penanganan kecacatan kusta sebagai pedoman penanganan kecacatan kusta dan SOP penanganan reaksi kusta sebagai pedoman penanganan reaksi kusta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/2004 menjelaskan Dinas Kesehatan sebagai induk dari Puskesmas yang berfungsi sebagai regulator memegang peranan penting dalam menentukan dan mengarahkan Puskesmas selaku UPT Dinas Kesehatan. Sebagai induk organisasi bagi Puskesmas, Dinas Kesehatan harus mempersiapkan semua kebutuhan Puskesmas, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas sampai pada menu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan Kabupaten.

Demikian juga mengenai pelaksanaan kegiatan kusta yang selama ini sudah dijalankan secara rutin oleh Puskesmas merupakan bagian kegiatan Dinas Kesehatan untuk Puskesmas. Dikarenakan hal tersebut ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai pemilik kegiatan dan pemegang anggaran kegiatan, diantaranya Dinas Kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kusta di Puskesmas serta membuat kebijakan terkait pelaksanaan program kusta di Puskesmas. Dinas Kesehatan juga akan memegang kendali dalam pencapaian program kusta di Puskesmas monitoring dan evaluasi menurut Supriyanto dan Damayanti (2007) merupakan bagian dari unsur organisasi, yaitu sebagai bentuk pengawasan atau kendali dalam organisasi. Salah satu bentuk monitoring evaluasi adalah supervisi, yaitu kegiatan pembinaan, bimbingan atau pengawasan oleh pengelola program terhadap pelaksanaan di tingkat administrasi yang lebih rendah dalam rangka menetapkan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan supervisi ini dapat dilakukan dengan cara terjadwal atau secara insidental, sehingga tujuan dari supervisi sebagai upaya pemantapan dan pemanfaatan bagi pengelola program di tingkat administrasi dapat tercapai.

Demikian halnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi juga harus ditentukan tujuan dan *output* yang ingin dicapai dari hasil monitoring tersebut. Untuk itu perlu dilakukan persiapan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, seperti kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan persamaan persepsi dalam tim monitoring.

Monitoring yang efektif untuk menilai pelaksanaan SOP oleh petugas kusta yaitu dengan langsung melakukan pengamatan kepada petugas kusta di lapangan. Pemantauan langsung akan mempermudah petugas memahami SOP yang dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan

bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien, konsisiten, standar dan sistematis (Tambunan, 2008).

Berdasarkan hasil uji regresi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta adalah kebijakan SOP dengan besar signifikansi 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan SOP dapat menjadi sebuah pedoman kebijakan yang menjadi dasar dari semua kegiatan organisasi, operasional dan administratif. Kebijakan sebagai aturan yang tidak tertulis dari pimpinan menjadi hal yang penting bagi bawahan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang belum jelas dampaknya sebagai dasar atau perlindungan bagi petugas itu sendiri. Kebijakan seorang pimpinan sangat penting dalam upaya memberikan arah dalam pelaksanaan organisasi (Tambunan, 2008). Kebijakan kepala Puskesmas untuk menerapkan SOP kusta bagi petugas kusta memberikan dorongan bagi petugas untuk patuh melaksanakan SOP kusta.

Dalam penelitian ini petugas kusta menilai bahwa kepala Puskesmas selaku atasan langsung dari programmer kusta, memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menata organisasi Puskesmas. Petugas mempercayai kepala Puskesmas sebagai pimpinan yang menjadi teladan, pimpinan yang mampu memberikan perlindungan bagi bawahan serta pimpinan yang menjadi sumber informasi bagi bawahannya. Namun, berdasarkan hasil kuesioner masih ada petugas yang menjawab bahwa adanya *rewards and punishment* dari pimpinan tidak menyebabkan petugas menjalankan SOP kusta, di mana pimpinan Puskesmas tidak begitu peduli dengan pelaksanaan SOP kusta di Puskesmas. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya pelaksanaan *coercive power* oleh Kepala Puskesmas di Kabupaten Sampang. Bawahan melaksanakan SOP kusta dikarenakan adanya rasa hormat dan rasa malu kepada kepala Puskesmas.

Adanya *reward* dari Dinas Kesehatan dengan mempromosikan petugas kusta sebagai tenaga kesehatan teladan tidak menjadi daya tarik bagi petugas kusta di Puskesmas, justru menjadi hal yang tidak diinginkan, dikarenakan adanya anggapan dari petugas kusta dengan menjadi tenaga kesehatan teladan akan menambah beban kerja dan beban moral petugas tersebut. Hasil uji regresi linear ganda menunjukkan bahwa *legitimate power* secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan melaksanakan SOP dengan besar signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP tergantung pada kemampuan kepala Puskesmas menggunakan hak dan kewenangannya (legitimasi) sebagai kepala Puskesmas untuk mengatur bawahannya dan juga bahwa tanggung jawab untuk patuh melaksanakan SOP dikarenakan orang yang memerintahkannya, bukan dirinya pribadi, misalnya atasan atau orang lain yang dianggap memiliki wewenang. Jika yang terjadi adalah demikian maka adanya otoritas/kewenangan dari pimpinan merupakan hal yang sangat

menentukan petugas untuk patuh atau tidak patuh melaksanakan SOP.

Seiring dengan perkembangan selama dilakukan penelitian ini petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang sudah mulai patuh untuk melaksanakan SOP yang dimulai dengan adanya komitmen wasor kusta di Dinas Kesehatan dalam memberikan tekanan kepada petugas kusta agar selalu menerapkan SOP kusta. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pimpinan dalam membuat suatu aturan sangat berperan bagi petugas, walaupun kemungkinan petugas patuh melaksanakan SOP dikarenakan adanya perasaan takut kepada pimpinan, tetapi hal ini sudah merupakan suatu awal atau permulaan yang bagus untuk membentuk komitmen petugas serta secara bertahap akan merubah kepatuhan petugas yang dilandasi rasa takut menjadi suatu kesadaran bagi petugas untuk melaksanakan SOP.

Richard M. Steers (Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi di mana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Pengaruh Faktor Persepsi Petugas tentang Power Kepala Puskesmas terhadap Kepatuhan Petugas Kusta Melaksanakan SOP Pelayanan Kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang

Faktor persepsi petugas terhadap power kepala Puskesmas, meliputi: *reward power*, *coercive power*, *legitimate power*, *expert power*, *referent power* dan *informational power*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan *reward power*, *coercive power*, *legitimate power* masih dalam kategori lemah. Faktor persepsi petugas terhadap power kepala Puskesmas yang masuk dalam kategori kuat adalah *expert power*, *referent power*, dan *informational power*.

Salah satu yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi adalah faktor dari pimpinan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu mengatur jalannya organisasi, memengaruhi bawahan dan memberikan perintah dan kebijakan-kebijakan dalam organisasi. Supaya seorang pimpinan mampu menjadi seorang yang dihormati dan dipatuhi semua perintahnya, maka pimpinan harus mempunyai power base (dasar kekuasaan) yang meliputi *reward power*, *coercive power*, *legitimate power*, *expert power*, *referent power* dan *informational power*.

Dalam penelitian ini petugas kusta menilai bahwa kepala Puskesmas selaku atasan langsung

dari programmer kusta, memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menata organisasi Puskesmas. Dalam hal ini petugas mempercayai kepala Puskesmas sebagai pimpinan yang menjadi teladan, pimpinan yang mampu memberikan perlindungan bagi bawahan serta pimpinan yang menjadi sumber informasi bagi bawahannya. Namun, berdasarkan hasil kuesioner masih ada petugas yang menjawab bahwa adanya *rewards and punishment* dari pimpinan tidak menyebabkan petugas menjalankan SOP kusta, di mana pimpinan Puskesmas tidak begitu peduli dengan pelaksanaan SOP kusta di Puskesmas. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya pelaksanaan *coercive power* oleh Kepala Puskesmas di Kabupaten Sampang.

Kepala Puskesmas yang ada saat ini tidak menjalankan *system rewards* dan *punishment*, hal ini menurut teori kepatuhan Milligram dikarenakan tidak adanya kekuatan dalam diri kepala Puskesmas untuk melaksanakan sistem tersebut. Bawahan melaksanakan SOP kusta dikarenakan adanya rasa hormat dan rasa malu kepada kepala Puskesmas.

Adanya *reward* dari Dinas Kesehatan dengan mempromosikan petugas kusta sebagai tenaga kesehatan teladan tidak menjadi daya tarik bagi petugas kusta di Puskesmas, justru menjadi hal yang tidak diinginkan, dikarenakan adanya anggapan dari petugas kusta dengan menjadi tenaga kesehatan teladan akan menambah beban kerja dan beban moral petugas tersebut (Millgram, 1984).

Kepala Puskesmas selaku pimpinan di Puskesmas tidak memiliki kekuatan untuk mengatur bawahan terkait dengan power yang ada dalam dirinya dikarenakan kepala Puskesmas diangkat sebagai pimpinan Puskesmas karena adanya penunjukan dari Dinas Kesehatan. Akibatnya kepala Puskesmas hanya memiliki kekuatan sebagai pimpinan di Puskesmas pada sebatas legalitas dirinya atau *legitimate power* (Millgram, 1984).

Hasil uji regresi linear ganda seperti menunjukkan bahwa *legitimate power* secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan melaksanakan SOP dengan besar signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP tergantung pada kemampuan kepala Puskesmas menggunakan hak dan kewenangannya (*legitimasi*) sebagai kepala Puskesmas untuk mengatur bawahannya dan juga bahwa tanggung jawab untuk patuh melaksanakan SOP dikarenakan orang yang memerintahkannya, bukan dirinya pribadi, misalnya atasan atau orang lain yang dianggap memiliki wewenang (Millgram, 1984). Jika yang terjadi adalah demikian maka adanya otoritas/kewenangan dari pimpinan merupakan hal yang sangat menentukan petugas untuk patuh atau tidak patuh melaksanakan SOP.

Selain itu juga tidak adanya sistem pelaporan secara berjenjang untuk program yang dibiayai langsung dari provinsi dan pusat, salah satunya adalah program kusta dari petugas kusta ke Dinas Kesehatan menyebabkan kepala Puskesmas tidak memiliki kekuatan untuk

melakukan koreksi atau *cross check* data. Petugas cenderung akan lebih patuh kepada Wasor yang ada di Kabupaten. Hal tersebut diatas menyebabkan kepala Puskesmas selaku pimpinan di Puskesmas tidak memungkinkan untuk menerapkan power kepemimpinan tersebut.

Pengaruh Faktor Petugas terhadap Kepatuhan Petugas Kusta Melaksanakan SOP Pelayanan Kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang

Faktor petugas dalam penelitian ini terdiri dari komponen motivasi dan komitmen petugas, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan komitmen petugas masih dalam kategori rendah. Adanya motivasi yang rendah diperlukan peran dari organisasi itu untuk meningkatkan motivasi. Hal ini ditunjukkan dengan teori motivasi (Ashar, 2006) bahwa adanya kebijakan dan peraturan dari organisasi tersebut dapat “menarik” atau “mendorong” motivasi kerja seorang tenaga kerja. Motivasi petugas sangat perlu untuk ditingkatkan karena motivasi merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tujuan berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi tercapainya kebutuhan tersebut. Kebutuhan petugas terhadap SOP kusta ini terkait dengan pelayanan prima yang harus diberikan kepada masyarakat, serta terkait adanya audit dari Dinas Kesehatan apabila terjadi tingkat kecacatan dan reaksi kusta yang tinggi, yang diakibatkan oleh petugas tidak melakukan pelayanan kusta sesuai dengan standar SOP. Karena rendahnya motivasi menimbulkan komitmen pada petugas dalam melaksanakan SOP juga rendah. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab. Jika pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri (Robbins dan Judge, 2007).

Komitmen petugas berpengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta, dengan besar signifikansi 0,005, sedangkan motivasi petugas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Adanya pengaruh komitmen dengan kepatuhan menunjukkan saat petugas memiliki komitmen yang kuat maka dia bersedia untuk mengusahakan pelaksanaan SOP pelayanan kusta.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian dan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dapat disusun rekomendasi. Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan adalah dengan menetapkan kebijakan secara tertulis tentang pelaksanaan SOP yang disertai dengan dibuatnya SK Kepala Dinas Kesehatan tentang kewajiban melaksanakan SOP bagi semua petugas kusta dalam memberikan pelayanan kepada pasien kusta. Membentuk tim pengendali mutu Dinas Kesehatan yang bertugas untuk memantau petugas

kusta di Puskesmas dalam melaksanakan SOP kusta yang berdasarkan pada pelaporan dari petugas kusta tentang tingkat kejadian kecacatan penderita dan reaksi kusta. Melakukan sosialisasi kepada penderita kusta mengenai SOP kusta serta mengadakan forum komunikasi dengan masyarakat tentang pelaksanaan SOP kusta dengan tujuan masyarakat sebagai konsumen paham dan mendukung penerapan SOP oleh petugas. Melakukan sosialisasi tentang peranan, manfaat dan fungsi SOP sebagai payung hukum bagi petugas kusta dalam memberikan pelayanan kepada pasien kusta. Memberlakukan sistem *rewards and punishment* kepada petugas kusta dalam melaksanakan SOP kusta. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dalam memantau pelaksanaan SOP oleh petugas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Rekomendasi untuk Kepala Puskesmas adalah dengan melakukan telaah kasus kusta yang disebabkan petugas tidak melaksanakan SOP kusta antar petugas kusta sebagai bentuk teguran bagi petugas yang tidak patuh melaksanakan SOP kusta. Menetapkan kebijakan alur pelaporan kusta, yaitu sebelum laporan kusta diserahkan ke Wasor Dinas Kesehatan, harus melalui kepala Puskesmas. Hal ini dilakukan untuk analisis dan telaah data kusta oleh kepala Puskesmas yang dapat dijadikan evaluasi bagi petugas kusta dalam melaksanakan SOP. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dalam memantau pelaksanaan SOP oleh petugas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Melakukan telaah kembali tentang SOP kusta yang sudah ada oleh Kepala Puskesmas bersama petugas kusta dan melakukan revisi SOP kusta disesuaikan dengan kondisi di Puskesmas, sehingga akan timbul rasa tanggung jawab untuk melaksanakan SOP tersebut.

SIMPULAN

Sebagian besar petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang patuh dalam melaksanakan SOP. Faktor monitoring evaluasi dan kebijakan Dinas Kesehatan berada pada kategori cukup, sedangkan berdasarkan kedua faktor tersebut hanya kebijakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta. Sebagian besar petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang memiliki persepsi yang kuat terhadap *power* kepala Puskesmas dalam mendukung melaksanakan SOP.

Namun, pada penilaian *reward power*, *coercive power* dan *legitimate power* masih berada pada kategori lemah. Faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta adalah *legitimate power*. Petugas kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang memiliki komitmen dan motivasi rendah dalam pelaksanaan SOP. Komitmen memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta.

SARAN

Melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan petugas kusta tentang pentingnya SOP kusta dilaksanakan dalam setiap pekerjaan, terutama dalam memberikan pelayanan prima dan sebagai payung hukum bagi petugas kesehatan, sehingga akan timbul kesadaran dan komitmen petugas kusta untuk melaksanakan SOP pelayanan kusta. Melakukan *review* dan perbaikan terhadap SOP kusta yang ada di Puskesmas secara berkala yang kemudian disepakati sehingga dapat menjadi norma petugas kusta dalam melaksanakan pekerjaan melalui proses komunikasi, pengawasan sampai pada pemberian sanksi. Mengomunikasikan secara terus menerus kesepakatan SOP yang telah disusun dengan Wasor Kabupaten, melakukan pengawasan sampai pada pemberian sanksi maupun *reward*, dengan tujuan agar tercipta suatu norma baru petugas kusta dalam melaksanakan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar. 2006. Motivasi. Edisi ke-4, Cetakan ke V. Gramedia. Jakarta.
- Depkes RI. 2004. Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta.
- Depkes RI. 2004. Modul Pelatihan Program P2 Kusta Bagi UPK, Subdirektorat Kusta dan Frambusia Jakarta.
- Depkes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.
- Millgram, Stanley. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. Harpercollins (ISBN 0-06-131983-X).
- Robbins S, Coutler M. 2003. Management 7th edition. New Jersey: Prentice-Hall.
- Supriyanto S dan Damayanti NA. 2007. Perencanaan dan Evaluasi, Cet. 1, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tambunan, Rudi M. 2008. Standart Operating Procedures (SOP). Jakarta: Maiestas Publishing.